

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Kabupaten Kotawaringin Timur

MENURUT PENGELUARAN

2012 - 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Kabupaten Kotawaringin Timur

MENURUT PENGELUARAN



2012 - 2016

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**

ISBN : 978.6202.6390
No. Publikasi : 62020.1703
Katalog : 9302020.6202

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xvi + 62 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur

Tata Letak, Gambar Kulit, dan Infografis:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur

Editor :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur

Dicetak Oleh :
CV. Azka Putra Pratama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENULIS

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| Penanggung Jawab Umum | : | Drs. M. Guntur |
| Penyusun Naskah | : | Tilas Notapiri, S.ST |
| Tata Letak | : | Nur Amanah, S.ST |
| Gambar Kulit | : | Tilas Notapiri, S.ST |
| Infografis | : | Tilas Notapiri, S.ST |
| Penyunting | : | Nur Amanah, S.ST |

KATA PENGANTAR

Buku Publikasi "**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2012-2016**" merupakan publikasi lanjutan dari tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Publikasi ini disusun untuk melihat gambaran pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran dan pendapatan perkapita di Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2012 – 2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010. Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat melengkapi sebagian dari sekian banyak kebutuhan data bagi pemakainya, baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan masyarakat swasta lebih luas.

Kami menyadari, walaupun telah dilakukan penghitungan dengan seksama, publikasi ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan publikasi ini di masa mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak terutama yang telah memberikan dukungan data sehingga tersusunnya publikasi ini, kami ucapkan terimakasih.

Sampit, 22 September 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR,



Drs. M. Guntur

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| PENJELASAN TEKNIS..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto | 3 |
| 1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB | 5 |
| BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA | 13 |
| 2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) | 13 |
| 2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) | 15 |
| 2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P) | 16 |
| 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 18 |
| 2.5 Perubahan Inventori (PI) | 21 |
| 2.6 Ekspor-Impor | 23 |
| BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN | 27 |
| 3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran | 27 |
| 3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga | 31 |
| 3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT | 35 |
| 3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah | 35 |
| 3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) | 37 |
| 3.6 Perkembangan Perubahan Inventori | 38 |
| 3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa | 39 |
| 3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa | 40 |
| 3.9 Perkembangan Net Ekspor | 41 |
| BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR..... | 45 |
| 4.1 PDRB (Nominal)..... | 45 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 4.2 | Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB..... | 46 |
| 4.3 | <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) | 47 |
| BAB V | PENUTUP | 49 |
| LAMPIRAN TABEL | | 53 |

<https://kotimkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 29 |
| Gambar 3.2 Perbandingan Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016 | 29 |
| Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 – 2016 | 30 |
| Gambar 3.4 Struktur dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016..... | 33 |
| Gambar 3.5 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 – 2016..... | 35 |
| Gambar 3.6 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 – 2016 | 37 |
| Gambar 3.7 Struktur dan Laju Pertumbuhan PMTB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016..... | 38 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016 | 27 |
| Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 28 |
| Tabel 3.3 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016 | 31 |
| Tabel 3.4 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 32 |
| Tabel 3.5 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016 | 34 |
| Tabel 3.6 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016 | 34 |
| Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 36 |
| Tabel 3.8 Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 39 |
| Tabel 3.9 Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 42 |
| Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016..... | 45 |
| Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016 | 46 |
| Tabel 4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016.. | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | Halaman |
|------------|---|---------|
| Lampiran 1 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016 | 55 |
| Lampiran 2 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016 | 56 |
| Lampiran 3 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016 | 57 |
| Lampiran 4 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016 | 58 |
| Lampiran 5 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2012 – 2016 | 59 |
| Lampiran 6 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2012 – 2016 | 60 |
| Lampiran 7 | Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012 – 2016 | 61 |
| Lampiran 8 | Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten kotawaringin Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2012 – 2016 | 62 |

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai "Sistem Neraca Nasional". Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

8. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

<https://kotimkab.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

3

Penyusunan PDRB dilakukan melalui pendekatan:



PRODUKSI



PENGELUARAN



PENDAPATAN

nilainya barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat, atau permintaan akhir dari berbagai komponen yaitu:



(PK-RT)

Konsumsi
Rumah Tangga



(PK-LNPRT)

Konsumsi
LNPR



(PK-P)

Konsumsi
Pemerintah



(PMTB)

Pembentukan
Modal Tetap Bruto



(P-I)

Perubahan
Inventori



(X-M)

Ekspor
Impor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini, seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (final output)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian*.

Model atau persamaan Keynesian adalah sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Y (Income) | = PDRB Produksi |
| C (Consumption) | = Konsumsi akhir |
| GFCF (Gross Fixed Capital Formation) | = Pembentukan Modal Tetap Bruto |
| Δ Inventori | = Perubahan Inventori |
| X | = Ekspor |
| M | = Impor |

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (external transaction). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”. Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB; dan
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi; dan
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai Tahun Dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- b. Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi, dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- d. Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- e. Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*); dan
- f. Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi, serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain:

- a. Konsep dan Cakupan
 - Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

output pertanian dan PMTB. Contoh: nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- Komputer *software* (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi

dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

b. Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

c. Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

d. Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

| PDRB Tahun Dasar 2000 | PDRB Tahun Dasar 2010 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga |
| 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT |
| 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah |
| 4. Perubahan Inventori | 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto |
| 5. Ekspor | 5. Perubahan Inventori |
| 6. Impor | 6. Ekspor |
| | 7. Impor |

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



PK-RT

mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik.



PK-LNPRT

merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional.



PK-P

mencakup nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia.



PMTB

mencakup penambahan dan pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, biaya alih kepemilikan atas aset non-fin ansial yang tidak diproduksi, perbaikan besar barang modal.



P-I

menjelaskan perubahan posisi barang inventori, selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan awal periode (akuntansi), yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).



X-M

didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah. Ekspor impor mencakup ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota, dan impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

A. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran². Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

B. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

C. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan

² Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan, dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku
6. Susun indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat)
7. Nilai PK-RT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

A. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

B. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

C. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lain
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll

D. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari:

- Survei Khusus Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- Indeks Harga Konsumen, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga berlaku)
5. Susun indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat)
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

A. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

B. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

C. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan, dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Triwulanan, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten/Kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan social, dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan.
2. PK-P atas dasar harga konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga berlaku dengan menggunakan *deflator* berikut:

| Jenis Belanja | Deflator | Keterangan |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Belanja Pegawai | Indeks Upah | Sama dengan Nasional |
| Belanja Barang | IHPB umum tanpa ekspor | Sama dengan Nasional |
| Penyusutan | Indeks Implisit PMTB | |
| Belanja Bansos | IHPB umum tanpa ekspor | Sama dengan Nasional |
| Penerimaan Barang dan Jasa | IHK umum | Prov atau Kab/Kota terdekat |
| <i>Social Transfer in Kind</i> | IHK umum | Prov atau Kab/Kota terdekat |
| Output BI | | Neraca Jasa |

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait

dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

B. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer, dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

C. Cakupan

PMTB mencakup beberapa hal berikut:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), dan produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*).
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

D. Sumber Data

Data yang digunakan antara lain:

- Output Industri Konstruksi, BPS
- Nilai Impor 2 digit HS, BPS
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum, BPS
- Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian

E. Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

1. Metode Langsung:

$$\begin{aligned} \text{PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Domestik)} &= \\ & \text{Barang Modal Domestik} + \text{TTM} + \text{Pajak atas Produk (PPN)} + \text{Biaya Instalasi} \\ \text{PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Impor)} &= \\ & \text{Barang Modal Impor} + \text{TTM} + \text{Bea Impor} + \text{Biaya Instalasi} \end{aligned}$$

PMTB Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

2. Metode Tidak Langsung:

$$\begin{aligned} \text{Pendekatan Supply} &: \\ \text{PMTB Atas Dasar Harga Berlaku} &= \\ & \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB} \end{aligned}$$

Pendekatan Ekstrapolasi :

$$PMTB \text{ Atas Dasar Harga Konstan}_{(t)} = PMTB \text{ Atas Dasar Harga Konstan}_{(t-1)} \times Indeks \text{ Produksi}_{(t)}$$

2.5 Perubahan Inventori (PI)

A. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

B. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen. Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi

rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

C. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- Data Komoditas Pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS
- Data Komoditas Perkebunan
- Indeks Harga Implisit Pdrb Industri Terpilih
- Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Terpilih
- Data Persediaan Beras, Bulog; Data Semen, Asosiasi Semen Indonesia; Data Gula, Dewan Gula Indonesia ; dan Data Ternak, Ditjennak Kementan.

E. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.

$$\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} = (\text{Volume Inventori}_{(t)} - \text{Volume Inventori}_{(t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI Atas Dasar Harga Konstan} = \frac{\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku}}{\text{IHPB}}$$

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI Atas Dasar Harga Konstan} = \frac{\text{Inventori}_{(t)} \text{ atas dasar harga berlaku}}{\text{IHPB}_{(t)}} - \frac{\text{Inventori}_{(t-1)} \text{ atas dasar harga berlaku}}{\text{IHPB}_{(t-1)}}$$
$$\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{PI Atas Dasar Harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata}_{(t)}$$

2.6 Ekspor-Import

A. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-import dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-import dari dan ke suatu wilayah.

B. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

C. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota; dan
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

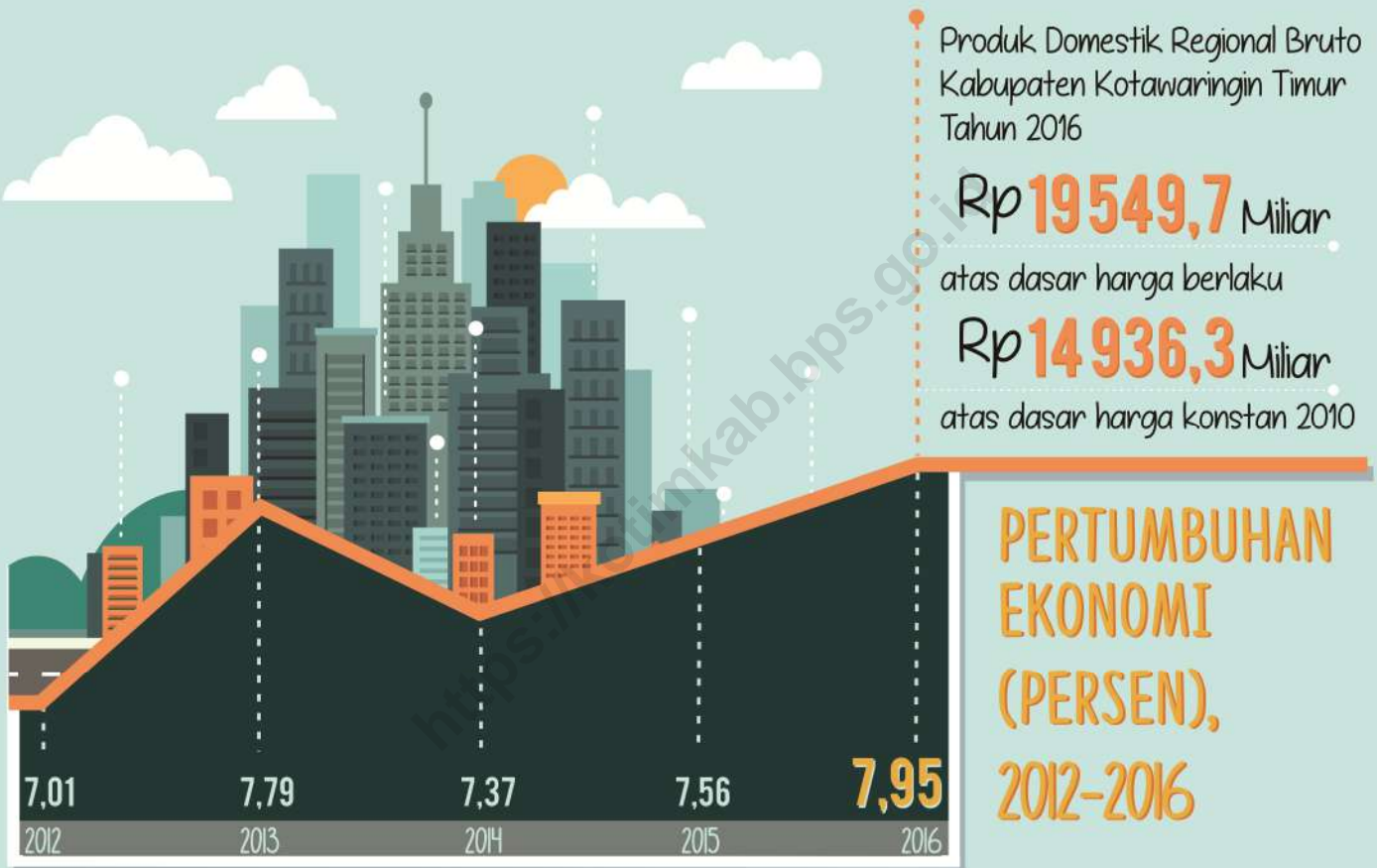
Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

D. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



PERTUMBUHAN TERTINGGI



EKSPOR - IMPOR

57,60%



PENGELUARAN KONSUMSI
RUMAH TANGGA

4,65%

STRUKTUR EKONOMI



PEMBENTUKAN MODAL
TETAP BRUTO

44,84%



PENGELUARAN KONSUMSI
RUMAH TANGGA

39,53%

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) terus menguat. Penguatan tersebut tentu berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

(Miliar Rp)

| Komponen Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 4 980,3 | 5 488,0 | 6 210,5 | 6 975,6 | 7 728,3 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 117,3 | 130,2 | 154,6 | 169,8 | 177,3 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 979,0 | 1 079,4 | 1 171,8 | 1 371,4 | 1 413,2 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 6 061,7 | 6 662,5 | 7 391,1 | 7 975,4 | 8 766,6 |
| 5. Perubahan Inventori | 107,4 | 113,7 | 219,2 | 228,8 | 182,1 |
| 6. Ekspor | 10 426,0 | 12 123,9 | 13 133,4 | 15 162,6 | 17 578,4 |
| 7. Impor | 10 244,4 | 11 591,4 | 12 916,6 | 14 612,2 | 16 296,2 |
| PDRB | 12 427,3 | 14 006,2 | 15 364,0 | 17 271,5 | 19 549,7 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012 hingga 2016, PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) terus meningkat. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur ADHB mencapai 19.549,7 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Dari seluruh komponen penyusun PDRB, komponen ekspor dan impor memiliki nilai yang paling besar. Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan posisi "surplus" yang berarti nilai ekspor cenderung lebih besar dibanding nilai impor.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara riil dari volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). Perkembangan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode 2012 hingga 2016 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sama halnya dengan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur ADHK mencapai 14.936,3 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.835,7 miliar Rupiah.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

(Miliar Rp)

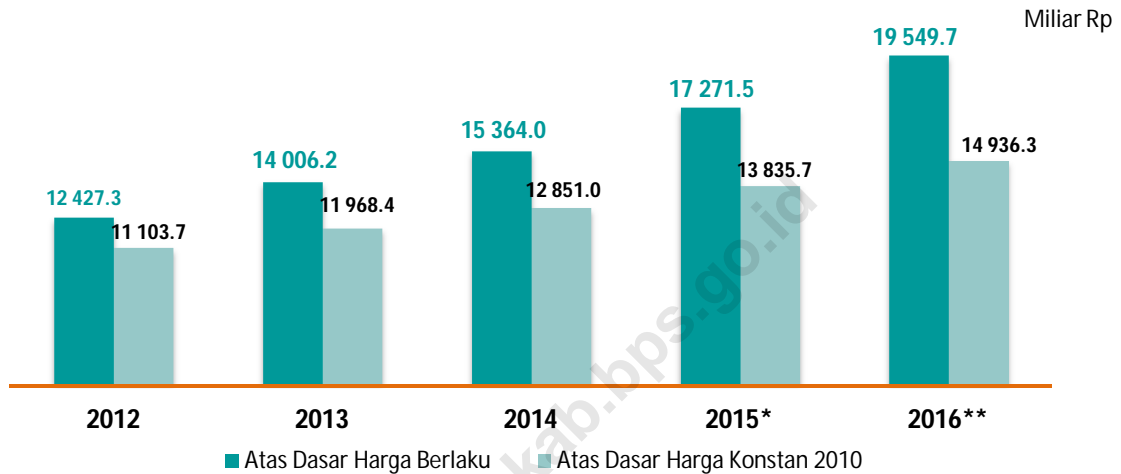
| Komponen Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 4 400,6 | 4 631,3 | 4 838,9 | 5 081,1 | 5 317,5 |
| 2. Konsumsi LNPR | 107,3 | 110,4 | 119,4 | 123,6 | 126,5 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 880,6 | 931,9 | 960,0 | 1 094,5 | 1 025,6 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5 216,1 | 5 337,4 | 5 702,1 | 6 030,8 | 6 218,4 |
| 5. Perubahan Inventori | 78,8 | 63,6 | 151,3 | 155,3 | 120,1 |
| 6. Ekspor | 9 462,2 | 10 666,4 | 11 223,0 | 11 933,1 | 13 381,5 |
| 7. Impor | 9 041,8 | 9 772,6 | 10 143,7 | 10 582,7 | 11 253,3 |
| PDRB | 11 103,7 | 11 968,4 | 12 851,0 | 13 835,7 | 14 936,3 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

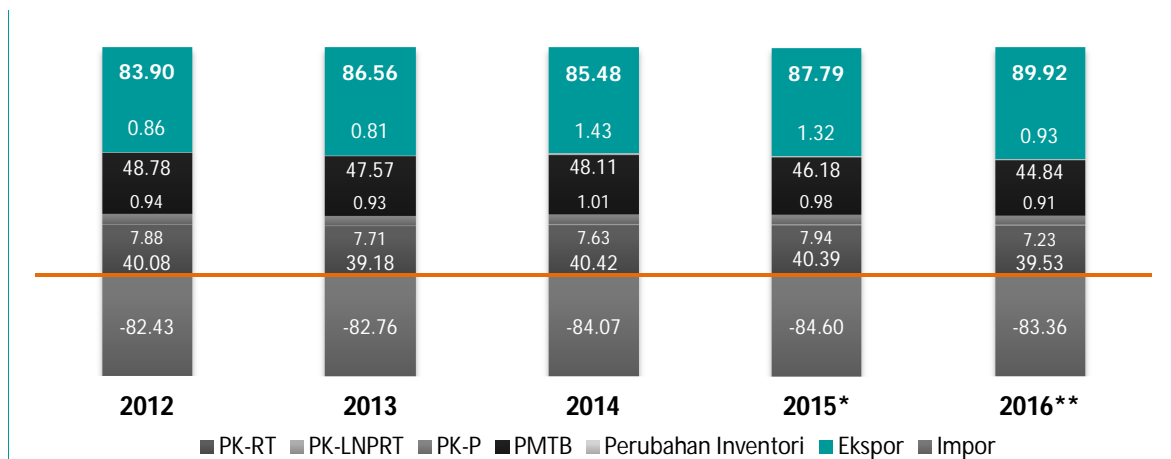
Pada umumnya nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut terjadi karena PDRB ADHB masih mengandung inflasi atau perubahan harga dalam perhitungannya. Sementara dalam PDRB ADHK faktor inflasi telah dihilangkan. Perbedaan tersebut dalam terlihat dari grafik berikut.

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016



Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur selama enam tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Struktur tersebut merupakan kontribusi dari komponen-komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau selisih antara ekspor dan impor.

Gambar 3.2 Perbandingan Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016

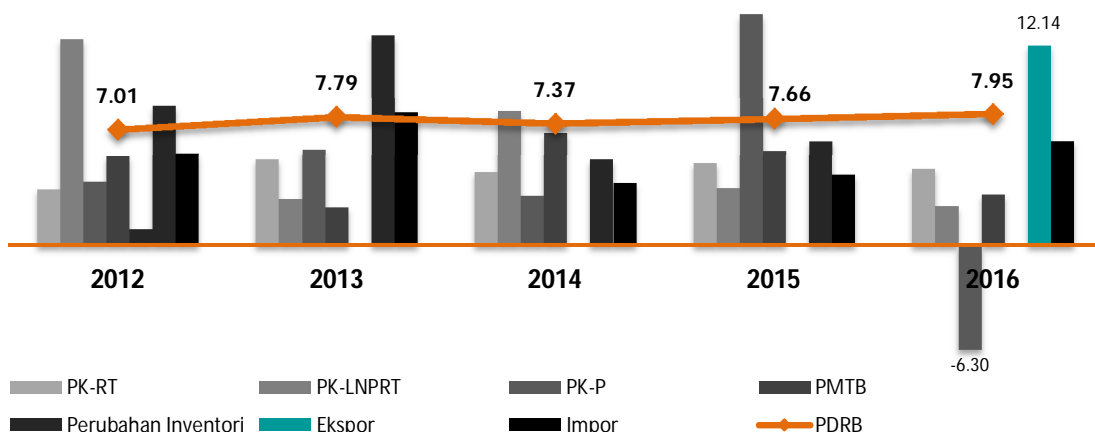


Selama periode 2012 hingga 2016, komponen ekspor merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu mencapai 89,92 persen. Hal ini cukup beralasan mengingat keberadaan pelabuhan Sampit dan Samuda menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, kabupaten ini merupakan pusat perekonomian dimana kegiatan perindustrian banyak terpusat di kabupaten ini, seperti industri CPO dan industri karet. Hal tersebut menyebabkan ekspor impor memiliki andil besar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur. Di sisi lain, komponen PMTB dan konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang cukup besar, masing-masing mencapai 44,84 persen dan 39,53 persen pada tahun 2016.

Kontribusi semua komponen terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung menurun di tahun 2016, kecuali komponen ekspor yang meningkat. Komponen tersebut berkontribusi sebesar 89,92 persen meningkat 2,13 poin dibanding tahun 2015. Meningkatnya kontribusi komponen tersebut didorong oleh meningkatnya kegiatan produksi usaha-usaha di sektor industri dan pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga mampu meningkatkan distribusi dan penjualannya ke luar daerah baik tujuan luar negeri maupun ke kabupaten lain.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selalu tumbuh di atas tujuh persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini mampu melaju hingga 7,95 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan yang tumbuh sebesar 6,36 persen.

Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 – 2016



Indeks implisit atau indeks perkembangan PDRB Pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir barang dan jasa (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan), maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Angka indeks implisit merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2016, Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 130,89 persen yang berarti harga konsumen pada tahun 2016 meningkat 30,89 persen dibandingkan tahun 2010.

Tabel 3.3 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Komponen Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 113,17 | 118,50 | 128,34 | 137,29 | 145,34 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 109,30 | 117,98 | 129,54 | 137,43 | 140,14 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 111,18 | 115,83 | 122,06 | 125,30 | 137,80 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 116,21 | 124,82 | 129,62 | 132,24 | 140,98 |
| 5. Perubahan Inventori | 136,36 | 178,81 | 144,89 | 147,35 | 151,60 |
| 6. Ekspor | 110,19 | 113,66 | 117,02 | 127,06 | 131,36 |
| 7. Impor | 113,30 | 118,61 | 127,34 | 138,08 | 144,81 |
| PDRB | 111,92 | 117,03 | 119,55 | 124,83 | 130,89 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Kondisi ekonomi yang kondusif tentu akan memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan daya beli. Meningkatnya penawaran dan persediaan barang dan jasa di pasar domestik dan didukung kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa tersebut turut menjadi pemicu peningkatan konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga.

Selama periode 2012 hingga 2016, konsumsi rumah tangga cenderung meningkat baik secara nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK 2010), seiring dengan penambahan jumlah rumah tangga maupun penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan mendorong terjadinya

kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi atau kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Walaupun kontribusinya sempat meningkat di tahun 2014, kontribusi tersebut kembali menurun di tahun 2015. Pada umumnya, hal tersebut terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memengaruhi belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.4 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total Konsumsi Rumah Tangga | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 4 980,3 | 5 488,0 | 6 210,5 | 6 975,6 | 7 728,3 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 4 400,6 | 4 631,3 | 4 838,9 | 5 081,1 | 5 317,5 |
| Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) | 40,08 | 39,18 | 40,42 | 40,39 | 39,53 |
| Rata-rata konsumsi perkapita/tahun (Ribu Rp) | | | | | |
| a. ADHB | 12 584,5 | 13 525,9 | 14 923,6 | 16 368,0 | 17 714,3 |
| b. ADHK 2010 | 11 119,7 | 11 414,5 | 11 627,8 | 11 922,6 | 12 188,4 |
| Pertumbuhan | | | | | |
| a. Total Konsumsi RT | 3,42 | 5,24 | 4,48 | 5,01 | 4,65 |
| b. per Rumah Tangga | 1,86 | 0,24 | 1,82 | 2,69 | 2,23 |
| c. per Kapita | 0,85 | 2,65 | 1,87 | 2,54 | 2,23 |
| Jumlah Penduduk (000 orang) | 395,7 | 405,7 | 416,2 | 426,2 | 436,3 |

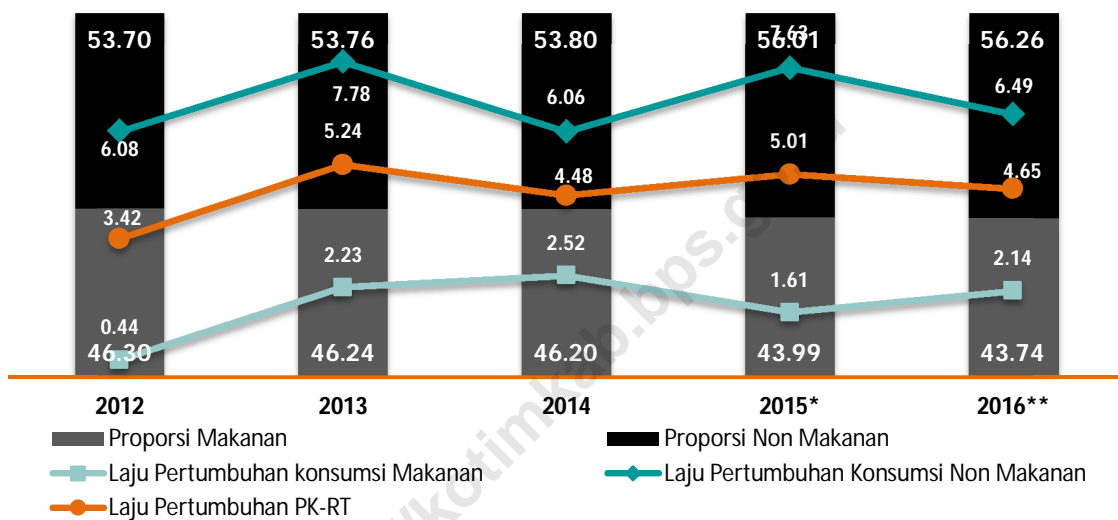
^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Serupa dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang cenderung menurun, laju pertumbuhan komponen tersebut juga melambat di tahun 2016. Selama periode 2012 hingga 2016, rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,56 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 mencapai 5,24 persen, sedangkan terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 3,42 persen. Pertumbuhan total konsumsi "riil" rumah tangga lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 2,40 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Dalam perkembangannya, rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2013 yang mencapai 2,65 persen, sementara terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 0,86 persen. Peningkatan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap struktur konsumsi rumah tangga.

Gambar 3.4 Struktur dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016



Konsumsi rumah tangga selama periode 2012 hingga 2016 sebagian besar digunakan untuk konsumsi non makanan. Proporsi tersebut terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai 56,26 persen. Dari 56,26 persen rata-rata konsumsi non makanan, paling besar digunakan untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yaitu sebesar 24,61 persen. Besarnya pengeluaran untuk komponen ini dapat menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam meningkatkan fasilitas transportasi bagi masyarakat. Selain itu, dapat juga menjadi peluang bisnis bagi pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai tempat wisata dan hiburan untuk masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2016 meningkat. Peningkatan tersebut didorong oleh semua subkomponen yang mengalami pertumbuhan positif. Subkomponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah subkomponen transportasi, komunikasi, konsumsi, rekreasi, dan budaya yang mampu melaju hingga 11,06 persen. Salah satunya terlihat dari semakin berkembangnya sektor Transportasi yang ditandai beroperasinya maskapai penerbangan baru di Bandara H Asan Sampit. Kemudian dari sektor rekreasi yang ditandai semakin banyaknya tempat hiburan masyarakat seperti wahana air dan taman-taman kota.

Tabel 3.5 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016

| Komponen Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 46,30 | 46,24 | 46,20 | 43,99 | 43,74 |
| b. Pakaian dan Alas Kaki | 4,38 | 4,31 | 4,13 | 4,00 | 3,91 |
| c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 16,20 | 16,52 | 16,61 | 16,30 | 15,90 |
| d. Kesehatan dan Pendidikan | 5,00 | 4,99 | 4,84 | 4,80 | 4,74 |
| e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 20,94 | 20,70 | 21,17 | 23,67 | 24,61 |
| f. Hotel dan Restoran | 2,20 | 2,27 | 2,26 | 2,45 | 2,42 |
| g. Lainnya | 4,98 | 4,97 | 4,78 | 4,80 | 4,67 |
| Total Konsumsi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3.6 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016

| Komponen Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 0,44 | 2,23 | 2,52 | 1,61 | 2,14 |
| b. Pakaian dan Alas Kaki | 1,77 | 4,35 | 5,96 | 3,23 | 1,97 |
| c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 4,37 | 9,54 | 7,40 | 3,54 | 3,65 |
| d. Kesehatan dan Pendidikan | 3,55 | 4,96 | 4,87 | 2,64 | 3,21 |
| e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 7,61 | 7,30 | 5,00 | 13,54 | 11,06 |
| f. Hotel dan Restoran | 9,74 | 9,30 | 7,39 | 9,12 | 3,13 |
| g. Lainnya | 9,72 | 9,28 | 6,94 | 3,20 | 2,67 |
| Total Konsumsi | 3,42 | 5,24 | 4,48 | 5,01 | 4,65 |

^{*)} Angka Sementara

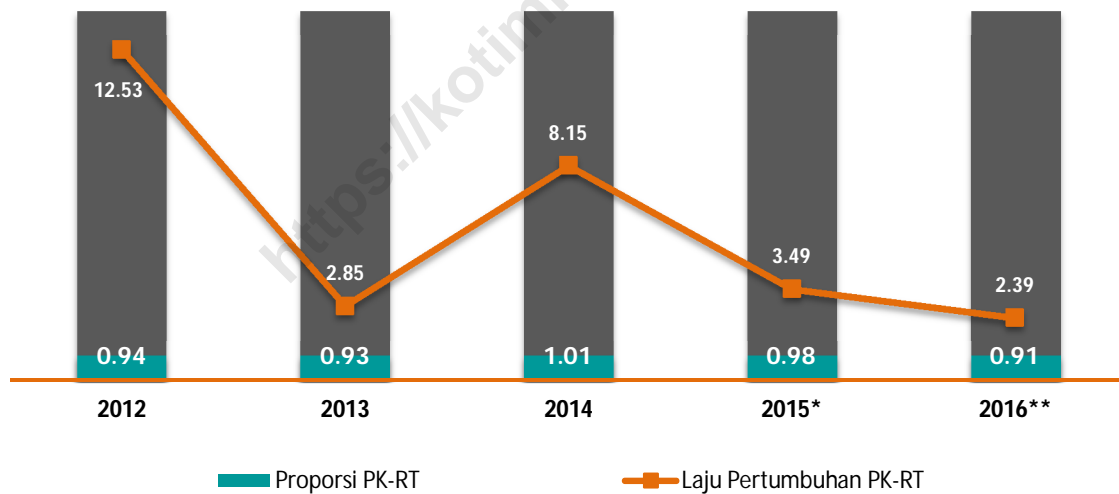
^{**)} Angka Sangat Sementara

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan akumulasi aset, Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. Lembaga ini diharapkan terus ditingkatkan peranannya sebagai pendorong perekonomian.

Selama periode 2012 hingga 2016, peranan konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi komponen ini terus menurun hingga pada tahun 2016 hanya berkontribusi sebesar 0,91 persen. Dari sisi pertumbuhan riil, konsumsi LNPRT terus melambat dan mencapai pertumbuhan terendah sepanjang periode di tahun 2016.

Gambar 3.5 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 – 2016



3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2012 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 979,0 miliar rupiah, terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai 1.413,2 miliar Rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah harga konstan 2010, terus meningkat setiap tahunnya.

Selama periode 2012 hingga 2016, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur rata-rata sebesar 7,68 persen. Pada awal periode, kontribusi komponen tersebut terus turun hingga tahun 2014. Walaupun kontribusi komponen tersebut sempat meningkat di tahun 2015, kontribusinya kembali turun di tahun 2016 hanya sebesar 7,23 persen. Persentase tersebut merupakan yang terendah selama periode 2012 hingga 2016.

Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total Konsumsi Pemerintah | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 979,0 | 1 079,4 | 1 171,8 | 1 371,4 | 1 413,2 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 880,6 | 931,9 | 960,0 | 1 094,5 | 1 025,6 |
| Proporsi terhadap PDRB | | | | | |
| (% ADHB) | 7,88 | 7,71 | 7,63 | 7,94 | 7,23 |
| Konsumsi pemerintah per kapita (Ribu Rp) | | | | | |
| a. ADHB | 2 473,8 | 2 660,3 | 2 815,7 | 3 218,0 | 3 239,2 |
| b. ADHK 2010 | 2 225,1 | 2 296,7 | 2 306,9 | 2 568,2 | 2 350,7 |
| Pertumbuhan (%) | | | | | |
| a. Total Konsumsi Pemerintah | 3,89 | 5,83 | 3,02 | 14,01 | -6,30 |
| b. Konsumsi per kapita | 1,31 | 3,22 | 0,44 | 11,33 | -8,47 |
| Jumlah penduduk (000 orang) | 395,7 | 405,7 | 416,2 | 426,2 | 436,3 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan riil konsumsi pemerintah selama periode 2012 hingga 2016 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015, komponen ini mampu melaju hingga mencapai 15,38 persen. Peningkatan di tahun 2015 mengindikasikan adanya upaya pemerintah dalam penyerapan anggaran APBD. Hingga akhir tahun 2015, realisasi belanja daerah mencapai 1.382 miliar Rupiah. Realisasi tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016, konsumsi pemerintah turun hingga 6,30 persen. Hal tersebut disebabkan disebabkan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun tersebut.

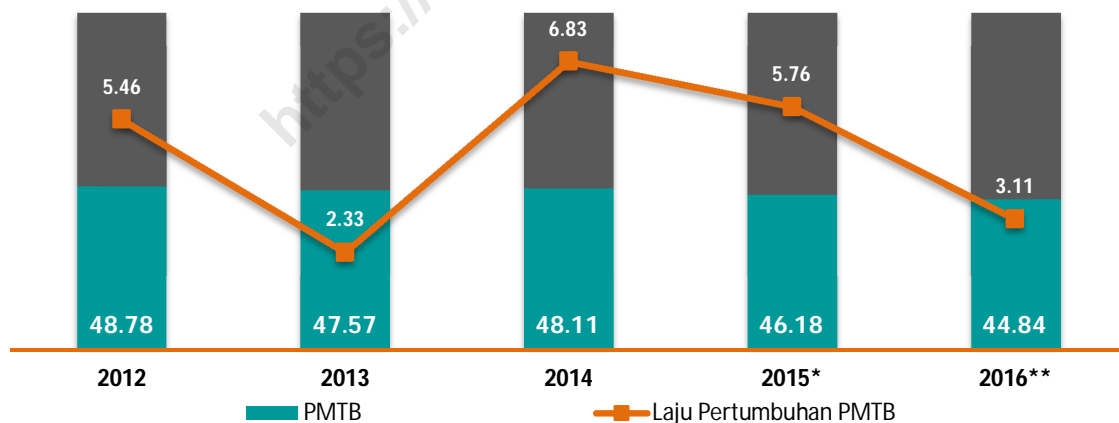
Besaran pengeluaran pemerintah biasanya dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran

pemerintah harus ditujukan untuk melayani masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Selama periode 2012 hingga 2016, konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku terus meningkat. Pada tahun 2016, rata-rata konsumsi pemerintah per kapita sebesar 3,2 juta rupiah yang berarti bahwa setiap penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh pelayanan dari pemerintah setiap tahun sebesar 3,2 juta Rupiah.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

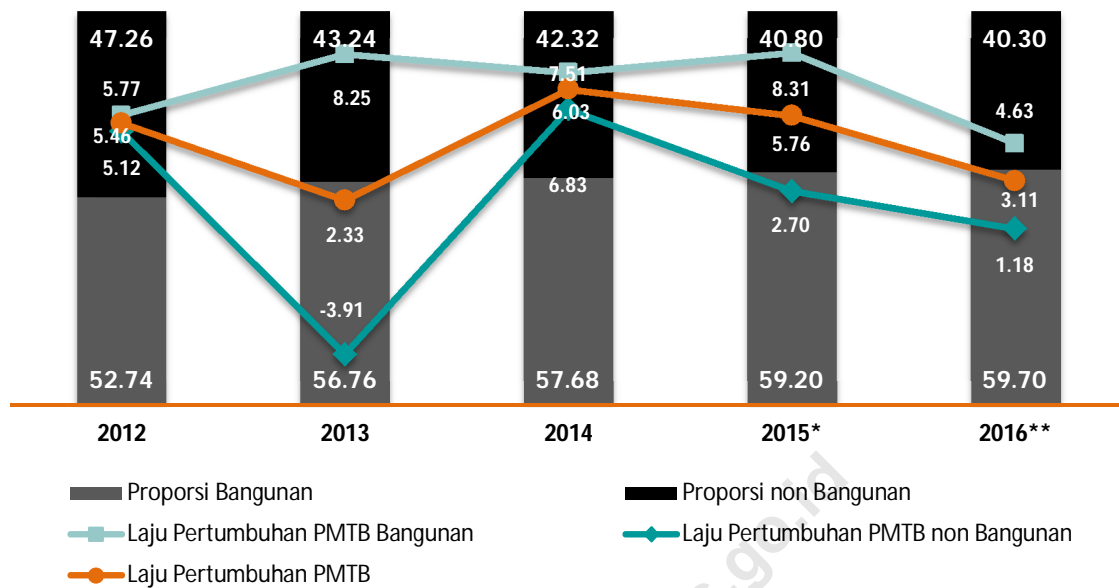
Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*capital*, selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun di ekspor). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Gambar 3.6 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 – 2016



Perkembangan komponen PMTB menurun di tahun 2016. Kontribusi komponen PMTB selama periode 2012 hingga 2016 rata-rata sebesar 47,09 persen. Pada tahun 2016 kontribusi komponen ini hanya mencapai 44,84 persen. Kontribusi tersebut turun dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan riil komponen ini juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2016, komponen ini hanya tumbuh sebesar 3,11 persen. Perlambatan tersebut disebabkan melambatnya perkembangan investasi bangunan maupun non bangunan.

Gambar 3.7 Struktur dan Laju Pertumbuhan PMTB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur (Persen), 2012 - 2016



Komponen PMTB terbentuk dari dua subkomponen yaitu PMTB bangunan dan PMTB non bangunan. Selama periode 2012 hingga 2016, PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur ditopang oleh kontribusi PMTB bangunan dengan rata-rata sebesar 57,22 persen. Kontribusi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 59,70 persen atau tumbuh 4,63 persen dari tahun sebelumnya.

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.8 Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total PMTB | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 107,4 | 113,7 | 219,2 | 228,8 | 182,1 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 78,8 | 63,6 | 151,3 | 155,3 | 120,1 |
| Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) | 0,86 | 0,81 | 1,43 | 1,32 | 0,93 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya. Hal utama yang dapat ditinjau dari komponen ini adalah proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Kontribusi perubahan inventori terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur sangat kecil. Selama periode 2012 hingga 2016, kontribusi komponen ini rata-rata hanya sebesar 1,07 persen. Kontribusi terbesar terjadi di tahun 2014 yang mencapai 1,43 persen. Namun kontribusi tersebut terus menurun hingga tahun 2016, hanya berkontribusi sebesar 0,93 persen terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Andil ekspor dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur semakin besar. Kontribusi komponen ekspor selama periode 2012 hingga 2016 rata-rata sebesar 86,73 persen. Pada tahun 2016 kontribusi komponen ini meningkat hingga mencapai 89,92 persen. Di sisi lain, pertumbuhan riil komponen ini juga mengalami percepatan. Pada tahun 2016, komponen ini

tumbuh mencapai 12,14 persen. Meningkatnya produksi industri kelapa sawit (CPO) dan aktivitas di sektor transportasi merupakan salah satu pemicunya.

Tabel 3.9 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total Ekspor | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 10 426,0 | 12 123,9 | 13 133,4 | 15 162,6 | 17 578,4 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 9 462,21 | 10 666,43 | 11 223,00 | 11 933,05 | 13 381,54 |
| Proporsi terhadap PDRB | | | | | |
| (% ADHB) | 83,90 | 86,56 | 85,48 | 87,79 | 89,92 |
| Pertumbuhan Riil | | | | | |
| (% ADHK 2010) | 8,47 | 12,73 | 5,22 | 6,33 | 12,14 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Kotawaringin Timur Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kotawaringin Timur di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 3.10 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total impor | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 10 244,38 | 11 591,37 | 12 916,64 | 14 612,19 | 16 296,22 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 9 041,84 | 9 772,64 | 10 143,72 | 10 582,68 | 11 253,33 |
| Proporsi terhadap PDRB | | | | | |
| (% ADHB) | 81,43 | 81,65 | 78,93 | 76,49 | 75,34 |
| Pertumbuhan Riil | | | | | |
| (% ADHK 2010) | 5,61 | 8,08 | 3,80 | 4,33 | 6,34 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Andil impor dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur semakin turun. Kontribusi komponen ekspor selama periode 2012 hingga 2016 rata-rata sebesar 83,44 persen. Pada tahun 2016 kontribusi komponen ini sebesar 83,36 persen. Di sisi lain, pertumbuhan riil komponen ini juga mengalami percepatan. Pada tahun 2016, komponen ini tumbuh mencapai 6,34 persen.

3.9 Perkembangan Net Ekspor

Net Ekspor didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor dan impor. Dalam perhitungannya, Net Ekspor hasilnya dapat memiliki dua tanda angka, positif atau negatif. Net Ekspor bertanda positif berarti nilai ekspor lebih besar dari impor, demikian sebaliknya.

Selama periode 2012 hingga 2016, nilai Net Ekspor selalu bernilai positif baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Hal tersebut berarti bahwa neraca perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami surplus, atau nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Pada tahun 2016, kinerja ekspor Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat tajam, ditandai dengan besarnya laju pertumbuhan net ekspor yang mencapai 57,60 persen.

Tabel 3.11 Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Total Net Ekspor | | | | | |
| a. ADHB (Miliar Rp) | 181,6 | 532,5 | 216,8 | 550,4 | 1282,2 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 420,4 | 893,8 | 1079,3 | 1350,4 | 2128,2 |
| Proporsi terhadap PDRB (% ADHB) | 1,46 | 3,80 | 1,41 | 3,19 | 6,56 |
| Pertumbuhan Riil (% ADHK 2010) | 159,48 | 112,62 | 20,75 | 25,12 | 57,60 |

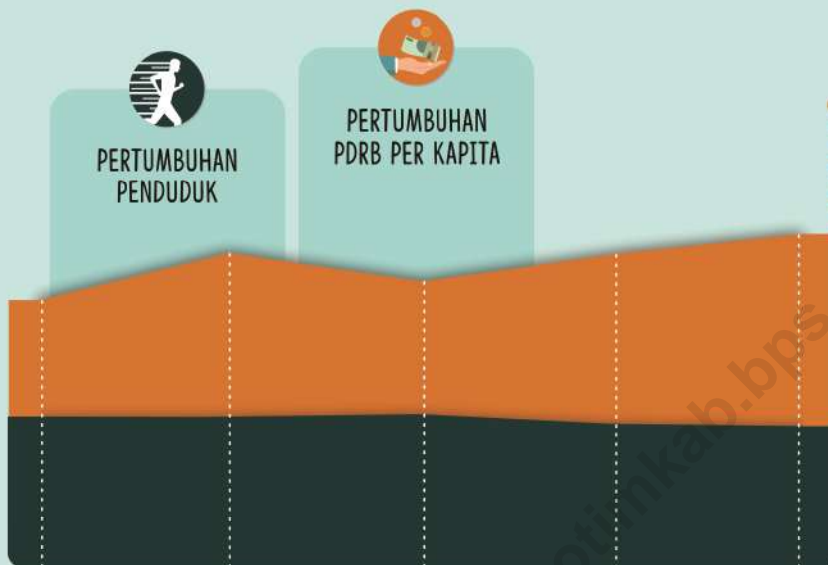
^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

<https://kotimkab.bps.go.id>

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

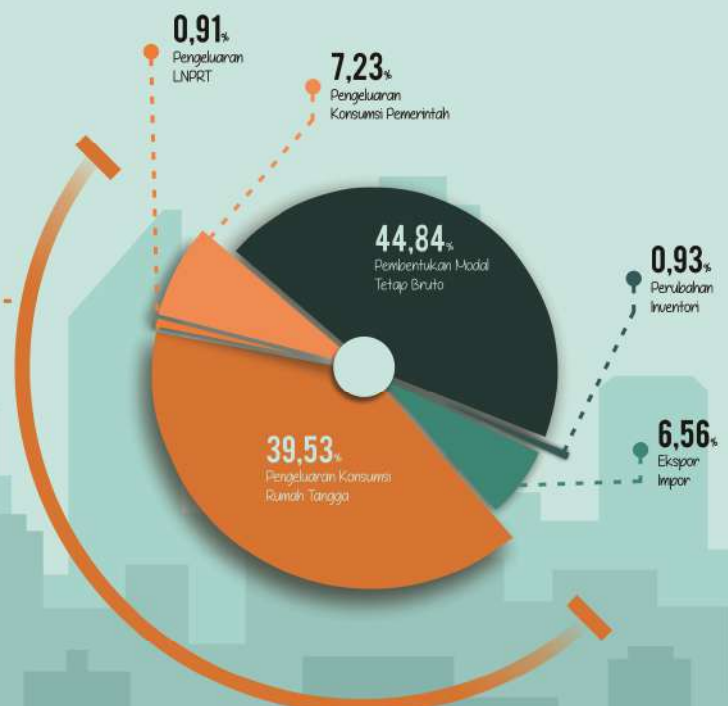


PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA DAN JUMLAH PENDUDUK PERIODE 2012-2016

Pertumbuhan PDRB per kapita lebih besar dibanding pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU, TAHUN 2016

47,67%
Pengeluaran digunakan untuk konsumsi akhir



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis sebelumnya.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur, di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas" karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nilai PDRB (Miliar Rp) | | | | | |
| a. ADHB | 12 427,3 | 14 006,2 | 15 364,0 | 17 271,5 | 19 549,7 |
| b. ADHK 2010 | 11 103,7 | 11 968,4 | 12 851,0 | 13 835,7 | 14 936,3 |
| PDRB per Kapita (Ribu Rp) | | | | | |
| a. ADHB | 31 402,2 | 34 520,3 | 36 919,2 | 40 526,7 | 44 810,4 |
| b. ADHK 2010 | 28 057,5 | 29 497,7 | 30 880,7 | 32 464,7 | 34 235,8 |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita | | | | | |
| (% ADHK 2010) | 4,36 | 5,13 | 4,68 | 5,13 | 5,46 |
| Jumlah Penduduk (000 orang) | 395,7 | 405,7 | 416,2 | 426,2 | 436,3 |
| Pertumbuhan (%) | 2,54 | 2,53 | 2,57 | 2,41 | 2,37 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut lebih besar dibanding pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini berarti pertumbuhan PDRB per kapita tidak hanya meningkat secara riil tetapi juga meningkat secara kualitas atau dengan kata lain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Timur tumbuh mencapai 5,46 persen sementara pertumbuhan jumlah penduduk melambat dan tumbuh sebesar 2,37 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

4.2 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Konsumsi Akhir (Miliar Rp) | | | | | |
| a. Rumah Tangga | 4 980,3 | 5 488,0 | 6 210,5 | 6 975,6 | 7 728,3 |
| b. LNPRT | 117,3 | 130,2 | 154,6 | 169,8 | 177,3 |
| c. Pemerintah | 979,0 | 1 079,4 | 1 171,8 | 1 371,4 | 1 413,2 |
| J u m l a h | 6 076,6 | 6 697,6 | 7 536,9 | 8 516,9 | 9 318,8 |
| PDRB (Miliar Rp) | 12 427,3 | 14 006,2 | 15 364,0 | 17 271,5 | 19 549,7 |
| Proporsi (%) | 48,90 | 47,82 | 49,06 | 49,31 | 47,67 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selama periode 2012 hingga 2016, barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur hampir 50 persen digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Konsumsi akhir secara total baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga, LNPRT ataupun pemerintah meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2016, proporsi konsumsi akhir pada tahun 2016 menurun dan merupakan yang terendah dalam periode lima tahun terakhir.

4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio atau "ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke-t

Y_t = Output tahun ke-t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1 atau tahun sebelumnya

Tabel 4.3 Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Kotawaringin Timur, 2012 - 2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ^{*)} | 2016 ^{**)} |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PDRB ADHK 2010 (Y_t) (miliar Rp) | 11 103,7 | 11 968,4 | 12 851,0 | 13 835,7 | 14 936,3 |
| Perubahan PDRB ADHK 2010 ($Y_t - Y_{t-1}$) (miliar Rp) | 727,7 | 864,7 | 882,7 | 984,7 | 1 100,6 |
| PMTB ADHK 2010 (I_t) (miliar Rp) | 5 216,1 | 5 337,4 | 5 702,1 | 6 030,8 | 6 218,4 |
| ICOR | 7,17 | 6,17 | 6,46 | 6,12 | 5,65 |

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Perkembangan nilai atau koefisien ICOR Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode 2012 hingga 2016 menunjukkan tren yang semakin membaik. Pada awal periode, tahun 2012, koefisien ICOR sebesar 7,17 yang berarti pada tahun tersebut untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 100 ribu Rupiah diperlukan investasi sebesar 717 ribu Rupiah. Pada tahun 2016, koefisien ICOR lebih kecil dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 5,65. Hal ini berarti produktivitas PMTB semakin baik karena semakin banyak outputnya yang berupa investasi fisik. Semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi. Walaupun secara riil, penambahan output tidak hanya disebabkan oleh investasi modal, dapat juga disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan lainnya.

<https://kotimkab.bps.go.id>

Bab V

Penutup

<https://ojs.uinika.ac.id/index.php/bps>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2012 hingga 2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB Pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB Pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB Pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2012 hingga 2016, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB Pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB Menurut Lapangan Usaha (Industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap ekonomi luar daerah.

<https://kotimkab.bps.go.id>

Lampiran

Tabel

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 4 980.26 | 5 487.97 | 6 210.45 | 6 975.65 | 7 728.34 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 2 305.71 | 2 537.82 | 2 868.96 | 3 068.74 | 3 380.69 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 218.00 | 236.74 | 256.68 | 278.70 | 302.36 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 807.03 | 906.63 | 1 031.77 | 1 137.24 | 1 228.46 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 249.08 | 273.76 | 300.53 | 334.72 | 366.64 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 1 043.09 | 1 136.08 | 1 314.97 | 1 651.02 | 1 902.21 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 109.52 | 124.33 | 140.51 | 170.69 | 187.40 |
| 1.g. Lainnya | 247.83 | 272.60 | 297.03 | 334.54 | 360.59 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 117.32 | 130.25 | 154.65 | 169.80 | 177.29 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 978.99 | 1 079.38 | 1 171.77 | 1 371.44 | 1 413.20 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 6 061.74 | 6 662.45 | 7 391.14 | 7 975.35 | 8 766.60 |
| 4.a. Bangunan | 3 197.23 | 3 781.36 | 4 263.43 | 4 721.60 | 5 233.81 |
| 4.b. Non-Bangunan | 2 864.51 | 2 881.09 | 3 127.71 | 3 253.75 | 3 532.79 |
| 5. Perubahan Inventori | 107.42 | 113.67 | 219.21 | 228.82 | 182.13 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 10 426.00 | 12 123.86 | 13 133.40 | 15 162.62 | 17 578.37 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 10 244.38 | 11 591.37 | 12 916.64 | 14 612.19 | 16 296.22 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 12 427.34 | 14 006.21 | 15 363.98 | 17 271.50 | 19 549.72 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 4 400.59 | 4 631.28 | 4 838.92 | 5 081.14 | 5 317.50 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 2 012.94 | 2 057.80 | 2 109.61 | 2 143.62 | 2 189.42 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 182.49 | 190.43 | 201.78 | 208.29 | 212.39 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 693.74 | 759.94 | 816.16 | 845.06 | 875.91 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 220.99 | 231.96 | 243.25 | 249.67 | 257.69 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 963.36 | 1 033.70 | 1 085.35 | 1 232.28 | 1 368.51 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 103.52 | 113.15 | 121.51 | 132.59 | 136.74 |
| 1.g. Lainnya | 223.55 | 244.31 | 261.27 | 269.63 | 276.83 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 107.33 | 110.39 | 119.39 | 123.56 | 126.51 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 880.57 | 931.87 | 960.00 | 1 094.53 | 1 025.57 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 5 216.05 | 5 337.45 | 5 702.14 | 6 030.79 | 6 218.36 |
| 4.a. Bangunan | 2 677.08 | 2 897.86 | 3 115.55 | 3 374.31 | 3 530.55 |
| 4.b. Non-Bangunan | 2 538.97 | 2 439.59 | 2 586.59 | 2 656.48 | 2 687.81 |
| 5. Perubahan Inventori | 78.77 | 63.57 | 151.29 | 155.29 | 120.14 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 9 462.21 | 10 666.43 | 11 223.00 | 11 933.05 | 13 381.54 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 9 041.84 | 9 772.64 | 10 143.72 | 10 582.68 | 11 253.33 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 11 103.68 | 11 968.35 | 12 851.02 | 13 835.68 | 14 936.28 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten otawaringin Timur
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 40.08 | 39.18 | 40.42 | 40.39 | 39.53 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 18.55 | 20.42 | 23.09 | 24.69 | 27.20 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 1.75 | 1.90 | 2.07 | 2.24 | 2.43 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 6.49 | 7.30 | 8.30 | 9.15 | 9.89 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 2.00 | 2.20 | 2.42 | 2.69 | 2.95 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 8.39 | 9.14 | 10.58 | 13.29 | 15.31 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.37 | 1.51 |
| 1.g. Lainnya | 1.99 | 2.19 | 2.39 | 2.69 | 2.90 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.91 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 7.88 | 7.71 | 7.63 | 7.94 | 7.23 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 48.78 | 47.57 | 48.11 | 46.18 | 44.84 |
| 4.a. Bangunan | 25.73 | 27.00 | 27.75 | 27.34 | 26.77 |
| 4.b. Non-Bangunan | 23.05 | 20.57 | 20.36 | 18.84 | 18.07 |
| 5. Perubahan Inventori | 0.86 | 0.81 | 1.43 | 1.32 | 0.93 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 83.90 | 86.56 | 85.48 | 87.79 | 89.92 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 82.43 | 82.76 | 84.07 | 84.60 | 83.36 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

* *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

**Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 39.63 | 38.70 | 37.65 | 36.72 | 35.60 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 18.13 | 18.53 | 19.00 | 19.31 | 19.72 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 1.64 | 1.72 | 1.82 | 1.88 | 1.91 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 6.25 | 6.84 | 7.35 | 7.61 | 7.89 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 1.99 | 2.09 | 2.19 | 2.25 | 2.32 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 8.68 | 9.31 | 9.77 | 11.10 | 12.32 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 0.93 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.23 |
| 1.g. Lainnya | 2.01 | 2.20 | 2.35 | 2.43 | 2.49 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.85 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 7.93 | 7.79 | 7.47 | 7.91 | 6.87 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 46.98 | 44.60 | 44.37 | 43.59 | 41.63 |
| 4.a. Bangunan | 24.11 | 24.21 | 24.24 | 24.39 | 23.64 |
| 4.b. Non-Bangunan | 22.87 | 20.38 | 20.13 | 19.20 | 18.00 |
| 5. Perubahan Inventori | 0.71 | 0.53 | 1.18 | 1.12 | 0.80 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 85.22 | 89.12 | 87.33 | 86.25 | 89.59 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 81.43 | 81.65 | 78.93 | 76.49 | 75.34 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 17.05 | 10.19 | 13.16 | 12.32 | 10.79 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 7.29 | 10.07 | 13.05 | 6.96 | 10.17 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 11.51 | 8.60 | 8.42 | 8.58 | 8.49 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 14.64 | 12.34 | 13.80 | 10.22 | 8.02 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 13.56 | 9.91 | 9.78 | 11.37 | 9.54 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 11.06 | 8.92 | 15.75 | 25.56 | 15.21 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 10.34 | 13.52 | 13.02 | 21.48 | 9.79 |
| 1.g. Lainnya | 17.11 | 10.00 | 8.96 | 12.63 | 7.79 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 23.00 | 11.02 | 18.74 | 9.80 | 4.41 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 15.50 | 10.25 | 8.56 | 17.04 | 3.05 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 22.55 | 9.91 | 10.94 | 7.90 | 9.92 |
| 4.a. Bangunan | 26.32 | 18.27 | 12.75 | 10.75 | 10.85 |
| 4.b. Non-Bangunan | 18.60 | 0.58 | 8.56 | 4.03 | 8.58 |
| 5. Perubahan Inventori | 53.80 | 5.82 | 92.85 | 4.38 | -20.41 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 19.51 | 16.28 | 8.33 | 15.45 | 15.93 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 19.65 | 13.15 | 11.43 | 13.13 | 11.52 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 19.77 | 12.70 | 9.69 | 12.42 | 13.19 |

* *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 3.42 | 5.24 | 4.48 | 5.01 | 4.65 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 0.44 | 2.23 | 2.52 | 1.61 | 2.14 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 1.77 | 4.35 | 5.96 | 3.23 | 1.97 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 4.37 | 9.54 | 7.40 | 3.54 | 3.65 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 3.55 | 4.96 | 4.87 | 2.64 | 3.21 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 7.61 | 7.30 | 5.00 | 13.54 | 11.06 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 9.74 | 9.30 | 7.39 | 9.12 | 3.13 |
| 1.g. Lainnya | 9.72 | 9.28 | 6.94 | 3.20 | 2.67 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 12.53 | 2.85 | 8.15 | 3.49 | 2.39 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 3.89 | 5.83 | 3.02 | 14.01 | -6.30 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 5.46 | 2.33 | 6.83 | 5.76 | 3.11 |
| 4.a. Bangunan | 5.77 | 8.25 | 7.51 | 8.31 | 4.63 |
| 4.b. Non-Bangunan | 5.12 | -3.91 | 6.03 | 2.70 | 1.18 |
| 5. Perubahan Inventori | 12.79 | -19.30 | 137.99 | 2.64 | -22.64 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 8.47 | 12.73 | 5.22 | 6.33 | 12.14 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 5.61 | 8.08 | 3.80 | 4.33 | 6.34 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 7.01 | 7.79 | 7.37 | 7.66 | 7.95 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 7. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 113.17 | 118.50 | 128.34 | 137.29 | 145.34 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 114.54 | 123.33 | 135.99 | 143.16 | 154.41 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 119.46 | 124.32 | 127.21 | 133.80 | 142.36 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 116.33 | 119.30 | 126.42 | 134.57 | 140.25 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 112.71 | 118.02 | 123.55 | 134.06 | 142.28 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 108.28 | 109.91 | 121.16 | 133.98 | 139.00 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 105.80 | 109.88 | 115.64 | 128.74 | 137.05 |
| 1.g. Lainnya | 110.86 | 111.58 | 113.69 | 124.07 | 130.26 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 109.30 | 117.98 | 129.54 | 137.43 | 140.14 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 111.18 | 115.83 | 122.06 | 125.30 | 137.80 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 116.21 | 124.82 | 129.62 | 132.24 | 140.98 |
| 4.a. Bangunan | 119.43 | 130.49 | 136.84 | 139.93 | 148.24 |
| 4.b. Non-Bangunan | 112.82 | 118.10 | 120.92 | 122.48 | 131.44 |
| 5. Perubahan Inventori | 136.36 | 178.81 | 144.89 | 147.35 | 151.60 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 110.19 | 113.66 | 117.02 | 127.06 | 131.36 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 113.30 | 118.61 | 127.34 | 138.08 | 144.81 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 111.92 | 117.03 | 119.55 | 124.83 | 130.89 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 8. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur
atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2012–2016**

| Komponen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 6.58 | 4.71 | 8.31 | 6.97 | 5.87 |
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 6.82 | 7.67 | 10.27 | 5.27 | 7.86 |
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 9.57 | 4.07 | 2.33 | 5.18 | 6.39 |
| 1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 9.84 | 2.56 | 5.96 | 6.45 | 4.22 |
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 9.66 | 4.71 | 4.69 | 8.51 | 6.13 |
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 3.21 | 1.50 | 10.24 | 10.58 | 3.74 |
| 1.f. Hotel dan Restoran | 0.55 | 3.86 | 5.24 | 11.33 | 6.45 |
| 1.g. Lainnya | 6.74 | 0.65 | 1.88 | 9.14 | 4.98 |
| 2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 2.73 | 7.94 | 9.79 | 6.09 | 1.97 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 6.10 | 4.18 | 5.38 | 2.65 | 9.97 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 9.87 | 7.41 | 3.84 | 2.02 | 6.61 |
| 4.a. Bangunan | 9.80 | 9.26 | 4.87 | 2.25 | 5.94 |
| 4.b. Non-Bangunan | 9.93 | 4.68 | 2.39 | 1.29 | 7.31 |
| 5. Perubahan Inventori | 0.07 | 31.13 | -18.97 | 1.70 | 2.89 |
| 6. Ekspor (6.a. + 6.b.) | 1.38 | 3.16 | 2.95 | 8.58 | 3.38 |
| 7. Impor (7.a. + 7.b.) | 6.96 | 4.69 | 7.36 | 8.43 | 4.88 |
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7) | 3.26 | 4.56 | 2.16 | 4.42 | 4.85 |

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 05 Sampit 74322

Telp. (0531) 30249; Fax: (0531) 21221

Website: <http://kotimkab.bps.go.id>; Email: bps6202@bps.go.id

ISBN 978-602-6390-50-9

